



Urgensi Relevansi Kompetensi Pimpinan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Prof. Dr. Ir. H. Ambo Tuwo, DEA

Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

I. Pendahuluan

Wilayah pesisir dan pulau kecil (P2K) memiliki nilai strategis karena sekitar 60 persen penduduk Indonesia hidup di wilayah P2K. Selain itu hampir 95 persen kegiatan perikanan Indonesia terkonsentrasi pada Wilayah P2K dengan kontribusi sekitar 76 persen terhadap produksi perikanan nasional. Wilayah P2K beserta sumberdaya alamnya juga memiliki arti ekonomi yang penting bagi pembangunan, karena wilayah P2K merupakan kawasan yang secara hayati sangat produktif. Sekitar 85 persen dari biota laut kehidupannya bergantung pada ekosistem P2K, seperti hutan mangrove, padang lamun, terumbu

karang dan estuaria (Tuwo dkk, 2005). Oleh sebab itu, wilayah P2K perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak, khususnya para pimpinan.

Wilayah P2K menyimpan sejumlah persoalan. Pada gatra sumber kekayaan alam (SKA) terdapat persoalan ekologi yang perlu dicermati oleh para pimpinan, seperti rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih (*overfishing*), abrasi pantai, serta degradasi fisik habitat pesisir lainnya. Pada gatra sosial dan ekonomi terdapat masalah kesejahteraan. Sedangkan pada gatra politik terdapat persoalan kelembagaan akibat adanya konflik

kewenangan antar berbagai instansi, kerancuan dalam pengaturan, serta lemahnya penegakan hukum di wilayah P2K.

Salah satu hambatan dalam pembangunan wilayah P2K adalah rendahnya relevansi kompetensi pimpinan. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan mengelola potensi SKA dan kemampuan memahami kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat pada wilayah P2K. Penguasaan kedua kompetensi ini oleh para pimpinan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi potensi SKA dan sumberdaya manusia dalam pembangunan di wilayah P2K.

II. Pengelolaan Potensi SKA

Untuk dapat memanfaatkan potensi wilayah P2K, seorang pimpinan perlu memahami azas pengelolaan SKA dan prinsip pengelolan SKA secara terpadu dan berkelanjutan. (lihat gambar 1)

Keterpaduan mencakup keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal dan vertikal. Keterpaduan perencanaan secara horizontal meliputi keterpaduan perencanaan dari berbagai sektor. Keterpaduan perencanaan vertikal meliputi keterpaduan kebijakan dan perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional. Keterpaduan ekosistem darat dan laut menggunakan kombinasi pendekatan batas ekologis misalnya daerah aliran sungai (DAS), dan wilayah administratif provinsi, kabupaten atau kota, dan Kecamatan sebagai basis perencanaan. Keterpaduan sains dan manajemen didasarkan pada masukan (input) data dan informasi ilmiah yang absah untuk memberikan berbagai alternatif dan rekomendasi bagi pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik sosial-ekonomi-



Gambar 1. Alur pikir urgensi relevansi kompetensi pimpinan dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

III. Asas Pengelolaan SKA

Asas pengelolaan SKA pada wilayah P2K adalah: (1) keterpaduan; (2) desentralisasi pengelolaan; (3) berkelanjutan; (4) keterbukaan dan peran serta masyarakat; dan (5) kepastian hukum (DKP, 2002).

budaya kelembagaan dan biogeofisik lingkungan setempat. Keterpaduan antar wilayah atau daerah mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan pemanfaatan SKA pada masing-masing wilayah atau daerah. Keterpaduan kebijakan ataupun



perencanaan antar daerah antara lain adalah mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan SKA yang bersifat lintas wilayah atau daerah.

Sejalan dengan otonomi daerah maka kewenangan pengelolaan pesisir telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 (Anonim, 2004). Urusan pemerintah yang disentralisasikan tersebut meliputi bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan pengelolaan kekayaan laut, tata ruang dan administrasi serta penegakan hukum di laut. Untuk itu perlu diperkuat kemampuan kelembagaan perencanaannya untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir di daerah.

Tujuan utama dari pengelolaan P2K secara terpadu adalah keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya P2K dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional dengan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya P2K dalam memenuhi kebutuhan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Keterbukaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami bahwa perencanaan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pada dasarnya untuk kepentingan masyarakat. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambah wawasan dalam proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah; sehingga kebijakan atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dapat mengurangi potensi konflik pemanfaatan atau konflik yurisdiksi yang diakibatkan oleh penempatan kebijakan itu sendiri. Oleh sebab itu, konsultasi publik yang melibatkan *stakeholder* utama sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengendalian adalah sangat penting (DKP, 2002).

Kepastian hukum merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kepastian hukum sangat penting untuk menentukan siapa yang mempunyai akses, hak memiliki dan memanfaatkan SKA wilayah P2K. Pemilikan dan penguasaan SKA tersebut dilindungi oleh negara dan diakui oleh *stakeholder* lainnya; sehingga setiap orang atau kelompok dapat mengelola pesisir secara terencana dan memiliki rasa kepemilikan yang menjadi nilai dasar pelestarian tersebut. Kepastian hukum dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan pada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan SKA tanpa intervensi oleh pihak kuasa atau pengguna SKA dari daerah lain (DKP, 2002). Bagi dunia usaha, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan infestasinya dalam jangka panjang serta mengurangi resiko berusaha. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, kepastian hukum dapat menjamin konsistensi dan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah secara penuh dan bertanggungjawab.



IV. Prinsip Pengelolaan SKA Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Ada empat alasan yang mendasari pentingnya pengelolaan P2K secara terpadu, yaitu: (1) secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis, baik antar ekosistem di dalam kawasan P2K maupun antara kawasan P2K dengan lahan atas dan laut lepas; (2) dalam suatu kawasan P2K biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan; (3) dalam suatu kawasan P2K biasanya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda; (4) baik secara ekologis, maupun ekonomis pemanfaatan suatu kawasan P2K secara monokultur atau *single use* adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha; dan (5) kawasan P2K merupakan sumberdaya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja, dimana setiap pengguna SKA biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan.

Pengelolaan sumberdaya P2K diarahkan pada upaya yang dapat memaksimalkan peran organisme hidup pada berbagai tingkatan tropik dalam mengalirkan energi dan mendaur ulang nutrisi secara maksimal. Produktivitas organisme dan keberlanjutan pemanfaatan sangat

ditentukan oleh aliran energi dan siklus nutrisi. Oleh karena itu, pengelolaan secara berkelanjutan tidak akan terwujud bilamana dalam pengelolaan suatu SKA dan lingkungan, aliran energi, siklus nutrisi dan peran organisme terganggu.

Pada ekosistem yang dieksploitasi secara tidak wajar, misalnya penebangan mangrove secara berlebihan atau pemboman pada ekosistem karang, dapat menyebabkan bergesernya bentuk keseimbangan dari kondisi stabil ke labil, sehingga terjadi gangguan hubungan fungsional organisme yang berakibat pada inefisiensi dalam hal aliran energi dan siklus nutrisi; yang pada tingkat lanjut dapat menyebabkan kerugian secara ekologi dan ekonomi. Sebagai contoh, eksploitasi berlebihan terhadap bivalvia *Pecten maximus* yang harganya sekitar US\$20 per kg menyebabkan energi yang tidak lagi dimanfaatkan oleh *Pecten maximus* dimanfaatkan oleh jenis bivalvia lainnya, yaitu *Clamis varia* yang harganya hanya sekitar US\$2 per kg. Meskipun secara ekologis telah terbentuk keseimbangan aliran energi dan siklus materi yang baru, namun secara ekonomi, hal ini kurang menguntungkan karena nilai sumberdaya menurun dari US\$20 per kg ke US\$2 per kg (Tuwo, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan SKA harus menghindari bentuk pemanfaatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial ekonomi.



V. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Masyarakat

Untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, seorang pemimpin harus memahami dengan baik kondisi sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat di wilayah P2K agar mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tantangan utama pimpinan adalah masih rendahnya tingkat pemanfaatan SKA yang ada pada wilayah P2K. Hal ini disebabkan oleh, antara lain : (1) perhatian pemerintah dan masyarakat yang masih mengutamakan eksploitasi daratan; (2) kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam sektor kelautan relatif masih rendah, khususnya di perikanan tangkap; (3) introduksi teknologi baru dalam perikanan tangkap tidak terjangkau oleh nelayan yang kondisi sosial ekonominya rendah, dan (4) sistem kelembagaan yang ada belum mendukung pengembangan sektor kelautan (Budiharsono, 2001).

Kondisi ini juga menyebabkan belum optimalnya tingkat produksi dari setiap unit usaha atau unit penangkapan, terutama nelayan-nelayan skala kecil. Tingkat produksi yang belum optimal di satu sisi dan biaya produksi atau operasional yang tinggi di sisi lain, menyebabkan tingkat pendapatan nelayan menjadi rendah dibandingkan dengan profesi lain. Hal ini dapat dijumpai di berbagai wilayah P2K di Indonesia. Salah satu ciri yang sangat menonjol dari kehidupan nelayan di Indonesia adalah tingkat

kesejahteraan yang rendah. Secara umum masyarakat nelayan lebih miskin dibanding masyarakat petani. Hal ini terutama karena tantangan alam yang dihadapi masyarakat nelayan sangat berat termasuk faktor musim, pola kerja yang homogen (hanya satu sumber penghasilan), keterbatasan penguasaan modal (perahu dan alat tangkap), keadaan pemukiman dan perumahan yang kurang memadai (Rahardjo, 1999).

Permodalan merupakan faktor penting dalam menunjang kelancaran kegiatan usaha perikanan. Ketersediaan modal merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat P2K. Masyarakat sangat sulit mengakses kredit dari perbankan karena faktor resiko yang tinggi sehingga perbankan sangat hati-hati dalam menyalurkan kredit modal di sektor perikanan (Nurfaizah, 2005).



Gambar 2. Ciri pemimpin kompeten dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil



Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil biasanya hidup berkelompok sehingga tercermin dari pola pemukimannya yang terpusat dan menghadap ke laut. Mereka juga berkelompok dalam kegiatan usaha penangkapan dan umumnya terpola pada hubungan kerja patron-klien (pongawa-sawi), sebagai pola yang telah lama melembaga. Selama ini, intervensi pemerintah dilakukan melalui program pemberdayaan yang mengharuskan berkelompok sehingga setiap program disertai dengan kegiatan penguatan kelembagaan, baik kelembagaan yang sudah ada sebelumnya maupun yang baru terbentuk. Penguatan kelembagaan terfokus pada tiga unsur utama, yaitu : (1) aturan dan prosedur (*norms and rules*), (2) organisasi (*organization*) dan (3) sumberdaya (*resources*).

Kelompok sosial merupakan bentuk himpunan atau kesatuan masyarakat P2K yang dilandasi oleh hubungan antara mereka. Hubungan tersebut dapat menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan mengandung unsur kesadaran untuk saling menolong. Kelompok ini terbentuk karena adanya: (1) kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari kelompok; (2) hubungan timbal balik antar anggota; (3) tujuan dan kepentingan yang sama; (4) struktur dan pola perilaku; dan (5) sistem dan proses (Soekamto, 1997). Kelompok tersebut berjalan dan berproses dengan

melalui suatu dinamika. Dinamika kelompok menekankan pada pengaruh interaksi sosial dan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi di dalam kehidupan berkelompok. Kondisi ini diwakili oleh pembentukan perilaku kelompok dan anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok (Santoso, 1992).

VI. Penutup

Untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses dalam membangun wilayah P2K, tidak cukup dengan hanya berbekal bakat kepemimpinan. Pemimpin harus senantiasa melakukan peningkatan relevansi kompetensi yang terkait dengan kondisi wilayah P2K yang sangat kompleks. Peningkatan relevansi kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan mengelola potensi SKA dan pemahaman akan kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat pada wilayah P2K. Seorang pimpinan yang kompeten memiliki mata yang besar sehingga dapat mengamati potensi wilayah tugasnya, telinga yang besar sehingga dapat mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat, tangan yang besar sehingga dapat membantu percepatan pembangunan, kaki yang besar sehingga dapat bekerja secara bekerja efektif dan efisien, dan menguasai seperangkat *tool* atau alat bantu dalam pemanfaatan SKA dan pemberdayaan masyarakat (Gambar 2).



VII. Daftar Pustaka

- Budiharsono, S., 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dahuri, R. 2002. Kebijakan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia yang Maju dan Makmur. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- DKP. 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/Men Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Nurfaizah, 2005. Evaluasi Program Penyaluran Kredit Sektor Perikanan (Studi Kasus PT. Bank Bukopin Canang Makassar). Skripsi Sosek Perikanan, FIKP-Unhas, Makassar.
- Rahardjo, 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Santoso, S. 1992. Dinamika Kelompok. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekamto, S. 1997. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Sujatno, A. 2013. Teori-Teori Kepemimpinan. Lemhannas RI. Jakarta
- Tuwo, A. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut - Pendekatan Ekologi, Sosial, Ekonomi dan Sarana Wilayah. Brillan Internasional. Surabaya. 412 h.
- Tuwo, A., A. Faizal, Amiluddin, M. Yunus, dan M. Alimin. 2005. Potensi/ Prospek Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir di Pantai Barat Sulawesi Selatan. Balitbangda Sulawesi Selatan. Makassar.

Sumber lain

- Ginting, S. P. 2013. Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir-IFAD. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kementerian Kelautan & Perikanan. <http://www.google.com/>